SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: p-ISSN 2615-3009
Economic, Accounting, Management and Business e-ISSN 2621-3389
Vol. 9, No. 1, January 2026

Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Internal dan Implikasinya Terhadap Temuan Audit: Studi Kasus Proyek Rehabilitasi Irigasi Wae Ces di Kabupaten Manggarai

Richardus Engel Tallo[1], Don Oscar Filius Sae[2], Alvonzo Rodriquez Watudhesi Toli[3], Oktavianus Hambur[4], Susana Purnamasari Baso[5]

Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Indonesia

oscarsae32@gmail.com[2], alvonsorodriques@gmail.com[3],
oktavianushambur@gmail.com[4], purnamabaso@gmail.com[5]
Email Korespondensi : engeltallo@gmail.com

Submitted: 05th Dec 2025 | **Edited**: 24th Dec 2025 | **Issued**: 01st January 2026

Cited on: Tallo, R. E., Sae, D. O. F., Toli, A. R. W., Hambur, O., & Baso, S. P. S. (2026). Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Internal dan Implikasinya Terhadap Temuan Audit: Studi Kasus Proyek Rehabilitasi Irigasi Wae Ces di Kabupaten Manggarai. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business*, *9*(1), 244-252.

ABSTRACT

This study examines the implementation of the Government Internal Control System (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah/SPIP) and its implications for audit findings in the Wae Ces Irrigation Rehabilitation Project, Manggarai Regency, East Nusa Tenggara. Despite the existence of a comprehensive regulatory framework governing internal control in the public sector, audit reports issued by the Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK) continue to reveal recurring weaknesses in internal control and irregularities in regional infrastructure projects. This condition raises concerns regarding the effectiveness of SPIP in preventing deviations during project implementation. The purpose of this research is to analyze how internal control practices are applied in the Wae Ces project and to identify factors contributing to audit findings related to control weaknesses. This study employs a qualitative case study approach to capture an in-depth understanding of governance practices in a real operational context. Data were collected through in-depth interviews with BPK auditors, internal auditors (APIP), and regional financial management officials, complemented by document analysis of audit reports, project documentation, and relevant regulations. The findings indicate that audit issues primarily stem from limited human resource capacity, weak supervision mechanisms, inadequate separation of duties, and ineffective monitoring processes. These weaknesses reduce the effectiveness of SPIP and contribute directly to recurring audit findings, particularly in relation to compliance and physical project realization. The study highlights the importance of strengthening internal control systems to enhance accountability and prevent similar irregularities in regional infrastructure projects.

Keywords: Government Internal Control, Audit Findings, Infrastructure Projects, Public Accountability, Regional Finance

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu instrumen utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik. Dalam konteks otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan yang luas dalam merencanakan dan melaksanakan anggaran, termasuk belanja infrastruktur yang menyerap porsi signifikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Oleh karena itu, diperlukan sistem pengendalian internal yang efektif untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan pemerintah dilaksanakan secara efisien, patuh terhadap regulasi, serta terhindar dari penyimpangan anggaran.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, dirancang sebagai kerangka pengendalian yang bertujuan memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi pemerintahan. SPIP mencakup lima unsur utama, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Implementasi SPIP yang optimal diharapkan mampu mencegah terjadinya kecurangan, menjamin keandalan laporan keuangan, dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (BPKP, 2021).

Namun demikian, berbagai laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa kelemahan pengendalian internal masih menjadi temuan dominan, khususnya pada proyek infrastruktur daerah. Temuan tersebut umumnya mencakup ketidakpatuhan terhadap ketentuan pengadaan barang dan jasa, kekurangan volume pekerjaan, serta ketidaksesuaian antara laporan realisasi dan kondisi fisik di lapangan (Ramadhani & Kurniawan, 2023). Kondisi ini mengindikasikan bahwa penerapan SPIP di tingkat operasional belum berjalan secara efektif dan konsisten.

Permasalahan tersebut juga tercermin dalam proyek Rehabilitasi Jaringan Irigasi Wae Ces di Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Proyek yang didanai melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) ini menjadi perhatian publik setelah muncul dugaan penyimpangan anggaran yang berujung pada proses hukum. Indikasi awal menunjukkan adanya kelemahan dalam pengawasan teknis, dokumentasi pelaksanaan pekerjaan, serta mekanisme pengendalian internal selama tahapan perencanaan dan pelaksanaan proyek. Kasus ini memperlihatkan bahwa permasalahan tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berkaitan erat dengan efektivitas sistem pengendalian internal pemerintah daerah.

Sejumlah penelitian terdahulu menegaskan bahwa lemahnya sistem pengendalian internal berkontribusi signifikan terhadap munculnya temuan audit, khususnya pada belanja modal dan proyek infrastruktur (Sari & Rahayu, 2020; Laksmi & Suryandari, 2023). Penelitian lain menunjukkan bahwa keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, rendahnya kualitas pengawasan internal, serta minimnya tindak lanjut atas rekomendasi audit menjadi faktor yang menyebabkan temuan serupa terus berulang dari tahun ke tahun (Widyaningsih & Pratama, 2024).

Meskipun demikian, sebagian besar penelitian sebelumnya masih didominasi oleh pendekatan kuantitatif dan analisis berbasis data sekunder, sehingga belum sepenuhnya mampu menggambarkan dinamika implementasi SPIP dalam konteks operasional proyek di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan penelitian dengan pendekatan kualitatif melalui studi kasus untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana mekanisme pengendalian internal dijalankan, aktor-aktor yang terlibat, serta faktor-faktor yang menyebabkan pengendalian internal tidak berfungsi secara optimal.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada proyek Rehabilitasi Irigasi Wae Ces di Kabupaten Manggarai serta menjelaskan bagaimana kelemahan dalam pengendalian internal berkontribusi terhadap munculnya temuan audit. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris bagi pengembangan kajian akuntansi sektor publik, sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dan aparat pengawasan dalam upaya memperkuat tata kelola proyek infrastruktur di masa mendatang.

LANDASAN TEORI

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan kerangka pengendalian yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam aspek efektivitas kegiatan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. SPIP tidak hanya dipahami sebagai seperangkat prosedur administratif, tetapi sebagai proses yang melekat dalam seluruh aktivitas organisasi dan dijalankan secara berkelanjutan oleh pimpinan dan seluruh aparatur pemerintah.

Literatur akuntansi sektor publik menegaskan bahwa efektivitas SPIP sangat ditentukan oleh kualitas implementasi lima unsur pengendalian, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, sistem informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Lingkungan pengendalian menjadi fondasi utama karena mencerminkan integritas, nilai etika, serta komitmen pimpinan terhadap akuntabilitas. Tanpa lingkungan pengendalian yang kuat, unsur pengendalian lainnya cenderung bersifat formalitas dan tidak berjalan secara substansial (Hidayat & Nugroho, 2020).

Dalam konteks pemerintah daerah, penerapan SPIP sering menghadapi tantangan struktural, seperti keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya budaya pengendalian, serta belum optimalnya pemahaman terhadap manajemen risiko. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kelemahan pada tahap penilaian risiko dan kegiatan pengendalian menjadi faktor dominan yang menyebabkan pengendalian internal tidak mampu mencegah penyimpangan sejak dini, khususnya pada proyek infrastruktur yang bersifat kompleks dan bernilai besar (Putri & Syamsuddin, 2021).

Audit Sektor Publik dan Temuan Audit

Audit sektor publik berfungsi sebagai mekanisme akuntabilitas untuk menilai kewajaran pengelolaan keuangan pemerintah serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Audit tidak hanya berfokus pada aspek pelaporan keuangan, tetapi juga mencakup penilaian atas sistem pengendalian internal dan kinerja pengelolaan anggaran. Temuan audit merupakan indikator penting yang mencerminkan kualitas tata kelola keuangan dan efektivitas pengendalian internal suatu entitas pemerintah.

Penelitian terkini menunjukkan bahwa temuan audit di pemerintah daerah umumnya berkaitan dengan kelemahan pengendalian internal, ketidakpatuhan terhadap ketentuan pengadaan barang dan jasa, serta ketidaksesuaian antara realisasi fisik dan laporan keuangan (Saputra & Adi, 2022). Temuan tersebut sering kali bersifat berulang, yang menandakan bahwa rekomendasi audit belum ditindaklanjuti secara efektif. Hal ini memperkuat pandangan bahwa audit eksternal tidak akan optimal tanpa dukungan pengawasan internal yang kuat dan independen.

Selain itu, kualitas temuan audit juga dipengaruhi oleh tingkat skeptisisme profesional auditor dan pendekatan audit berbasis risiko. Auditor cenderung

memberikan perhatian lebih besar pada entitas atau program dengan riwayat temuan berulang, sehingga proyek infrastruktur daerah sering ditempatkan sebagai area berisiko tinggi (Nugraha & Prabowo, 2023).

Proyek Infrastruktur Daerah dan Risiko Penyimpangan

Proyek infrastruktur daerah merupakan salah satu bentuk belanja modal yang memiliki tingkat risiko penyimpangan relatif tinggi. Kompleksitas teknis pekerjaan, nilai kontrak yang besar, serta keterlibatan banyak aktor membuka peluang terjadinya kesalahan maupun penyalahgunaan kewenangan. Risiko tersebut meningkat ketika pengendalian internal tidak berjalan efektif, khususnya pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan teknis.

Beberapa studi menunjukkan bahwa ketidaksesuaian spesifikasi teknis, kekurangan volume pekerjaan, dan lemahnya dokumentasi merupakan bentuk penyimpangan yang paling sering ditemukan pada proyek infrastruktur daerah (Rahman & Fauzi, 2020). Kondisi ini umumnya disebabkan oleh lemahnya pengawasan lapangan dan minimnya verifikasi fisik secara berkala. Tanpa pengendalian yang memadai, laporan realisasi proyek tidak mencerminkan kondisi aktual di lapangan, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara.

Dalam konteks proyek irigasi, risiko penyimpangan semakin besar karena pekerjaan bersifat teknis dan sulit diverifikasi hanya melalui dokumen administrasi. Oleh karena itu, peran sistem pengendalian internal menjadi sangat krusial untuk memastikan kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan hasil pekerjaan.

Hubungan SPIP dan Temuan Audit

Secara teoritis, terdapat hubungan yang erat antara efektivitas sistem pengendalian internal dan jumlah serta jenis temuan audit. Pengendalian internal yang kuat berfungsi sebagai mekanisme pencegahan, sedangkan pengendalian yang lemah akan meningkatkan probabilitas munculnya temuan audit. Temuan audit pada proyek infrastruktur umumnya merupakan manifestasi dari kegagalan sistem pengendalian internal dalam mengidentifikasi dan mengendalikan risiko sejak tahap awal.

Penelitian empiris menunjukkan bahwa pemerintah daerah dengan tingkat kematangan SPIP yang rendah cenderung memiliki jumlah temuan audit yang lebih tinggi, khususnya pada belanja modal dan pengelolaan aset (Sutrisno & Mahendra, 2021). Sebaliknya, penguatan fungsi pengawasan internal dan pemantauan berkelanjutan terbukti mampu menurunkan tingkat temuan audit secara signifikan.

Berdasarkan kajian teoritis tersebut, penelitian ini memposisikan SPIP sebagai variabel kunci yang memengaruhi munculnya temuan audit pada proyek infrastruktur daerah. Analisis terhadap implementasi SPIP dalam studi kasus proyek Rehabilitasi Irigasi Wae Ces diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai mekanisme penyimpangan serta titik-titik kritis pengendalian internal yang perlu diperkuat.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah studi kasus. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan dampaknya terhadap hasil audit pada proyek Rehabilitasi Irigasi Wae Ces di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti mempelajari fenomena pengelolaan keuangan daerah dalam konteks yang rumit dan nyata, di mana batas antara peristiwa, aktor, dan lingkungan kebijakan tidak dapat dipisahkan (Yin, 2021). Fokus penelitian adalah

proses pengendalian internal, metode pengawasan, dan variabel yang mempengaruhi hasil audit proyek infrastruktur daerah.

Pilihan informan dilakukan secara purposive berdasarkan keterlibatan langsung dan pemahaman tentang proses audit dan pelaksanaannya. Informasi penelitian terdiri dari auditor dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), dan pejabat pengelola keuangan dan teknis dari lembaga perangkat daerah yang relevan. Untuk mengeksplorasi pengalaman, persepsi, dan praktik pengendalian internal yang digunakan, wawancara mendalam yang semi-terstruktur digunakan untuk mendapatkan data primer. Selain itu, data sekunder dikumpulkan melalui peninjauan dokumen yang relevan, seperti dokumen kontrak proyek, laporan realisasi fisik dan keuangan, laporan hasil pemeriksaan BPK, dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Menurut Merriam & Tisdell (2019), kombinasi sumber data ini dimaksudkan untuk meningkatkan kedalaman analisis dan mengurangi bias informasi.

Secara tematik, analisis data dilakukan melalui proses reduksi data, pengelompokan kategori, penarikan tema, dan interpretasi makna yang didasarkan pada kerangka konseptual penelitian. Untuk memungkinkan pendalaman temuan secara berkelanjutan, proses analisis dilakukan secara bersamaan dengan pengumpulan data. Metode triangulasi sumber dan metode, bersama dengan dokumen pendukung, memastikan keabsahan data. Menurut Creswell & Poth (2019), metode ini diharapkan dapat menghasilkan hasil yang dapat diterima dan mencerminkan kondisi empiris penerapan SPIP serta dinamika pengawasan audit pada proyek infrastruktur daerah.

HASIL PENELITIAN

Keterbatasan Kapasitas Sumber Daya Manusia dalam Pengelolaan Proyek

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekurangan kapasitas sumber daya manusia (SDM) adalah salah satu faktor utama yang menyebabkan proyek Rehabilitasi Irigasi Wae Ces gagal menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Menurut wawancara dengan aparatur pengelola keuangan daerah dan auditor BPK, beberapa karyawan yang bekerja dalam pengelolaan proyek tidak memiliki pengetahuan akuntansi dan teknis yang memadai. Kondisi ini menyebabkan pencatatan yang buruk, penggunaan akun belanja yang tidak tepat, dan kurangnya dokumentasi pertanggungjawaban.

Menurut informasi yang diberikan oleh Inspektorat Daerah, kekurangan kompetensi menyebabkan proses verifikasi internal tidak berjalan dengan baik. Dokumen pendukung disusun secara administratif tanpa verifikasi fisik yang memadai selama beberapa tahapan proyek. Akibatnya, laporan hasil pekerjaan tidak sepenuhnya mencerminkan keadaan sebenarnya di lapangan, sehingga temuan audit dapat muncul.

Lemahnya Kegiatan Pengendalian dan Pemantauan Internal

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komponen kegiatan pengendalian dan pemantauan dalam SPIP belum diterapkan dengan benar. Seringkali, pengawasan teknis terhadap pelaksanaan pekerjaan fisik dilakukan pada akhir periode anggaran daripada secara berkala selama proses konstruksi. Pola pengawasan seperti ini meningkatkan kemungkinan terjadi ketidaksesuaian spesifikasi dan kekurangan volume pekerjaan saat proyek mendekati tahap penyelesaian, menurut auditor BPK.

Penelitian juga menunjukkan bahwa pemisahan fungsi belum digunakan dengan benar. Dalam beberapa unit kerja, satu orang melakukan perencanaan, pencatatan, dan pemeriksaan secara bersamaan, yang bertentangan dengan prinsip dasar pengendalian internal. Meskipun beban kerja yang tinggi dan keterbatasan jumlah pegawai sering

dijadikan alasan pembenar untuk praktik tersebut, mereka juga berisiko menurunkan efektivitas pengendalian.

Peran Audit Internal yang Belum Optimal

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam mencegah penyimpangan masih belum optimal. Wawancara dengan auditor internal mengungkapkan bahwa keterbatasan jumlah auditor dan minimnya pelatihan berkelanjutan menyebabkan fungsi audit internal lebih berfokus pada pemenuhan administrasi dibandingkan pengawasan substantif. Dalam konteks proyek Wae Ces, audit internal belum mampu mendeteksi secara dini indikasi penyimpangan yang kemudian muncul sebagai temuan audit eksternal.

Dampak Penguatan Pendekatan Audit Eksternal

Studi menunjukkan bahwa perubahan metode audit BPK berdampak pada peningkatan kasus penyimpangan anggaran di wilayah Nusa Tenggara Timur. Auditor meningkatkan verifikasi fisik di lapangan, memperluas sampel pemeriksaan, dan menerapkan pengujian substantif yang lebih mendalam. Selain itu, ada peningkatan skeptisisme di kalangan profesional auditor, yang percaya bahwa setiap klaim realisasi harus didukung oleh bukti yang dapat dipercaya. Perubahan metode ini meningkatkan jumlah dan kualitas temuan audit proyek infrastruktur daerah.

Pembahasan

Penelitian ini mendukung gagasan bahwa keberhasilan SPIP sangat bergantung pada kemampuan sumber daya manusia dan kekonsistenan pelaksanaan pengendalian internal. Sebuah penelitian oleh Putri dan Syamsuddin (2021) menemukan bahwa keterbatasan kemampuan staf pengelola proyek meningkatkan kemungkinan penyimpangan belanja modal karena kurangnya pemahaman staf tentang pengendalian internal dan pengelolaan risiko.

Temuan Rahman dan Fauzi (2020), yang menunjukkan bahwa pengawasan fisik yang tidak berkelanjutan adalah penyebab utama ketidaksesuaian spesifikasi dan volume pekerjaan yang rendah pada proyek infrastruktur daerah, konsisten dengan kelemahan operasi pengendalian dan pemantauan proyek Wae Ces. Ketika pengendalian internal hanya dilakukan sebagai tugas administratif, SPIP hanya berfungsi sebagai pelengkap dokumentasi daripada berfungsi sebagai alat pencegahan.

Selain itu, temuan penelitian ini mendukung hasil penelitian Wahyuni dan Lestari (2024), yang menyatakan bahwa kurangnya kapasitas APIP berdampak langsung pada jumlah temuan audit eksternal yang tinggi. Auditor eksternal harus melakukan pengujian yang lebih mendalam karena audit internal tidak dapat menemukan kesalahan sejak awal.

Menurut Nugraha dan Prabowo (2023), sejarah temuan berulang mendorong auditor untuk menetapkan proyek infrastruktur sebagai area berisiko tinggi, serta peningkatan skeptisisme profesional dan pendekatan audit berbasis risiko yang diterapkan BPK dalam penelitian ini. Oleh karena itu, hasil audit bukanlah hasil dari kesalahan teknis semata; itu adalah akumulasi kesalahan sistemik dalam sistem pengendalian internal.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa temuan audit pada proyek Rehabilitasi Irigasi Wae Ces merupakan konsekuensi logis dari lemahnya implementasi SPIP, khususnya pada aspek kegiatan pengendalian, pemantauan, dan pengawasan internal. Temuan ini memperkaya literatur akuntansi sektor publik dengan memberikan bukti empiris berbasis studi kasus mengenai hubungan antara pengendalian internal dan temuan audit pada proyek infrastruktur dae

Pembahasaan

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan keuangan daerah di Nusa Tenggara Timur sangat dipengaruhi oleh tata kelola internal pemerintah daerah serta kapasitas audit yang dilakukan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). Berdasarkan wawancara dengan auditor internal, pejabat pengelola keuangan, dan akademisi yang memahami dinamika fiskal daerah, terlihat bahwa salah satu akar persoalan utama adalah ketidakkonsistenan dalam penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang sebenarnya telah diatur dalam berbagai regulasi nasional.

Para informan menegaskan bahwa kasus penyimpangan anggaran di NTT dalam beberapa tahun terakhir bukan sekadar kesalahan administratif, melainkan bentuk lemahnya pengawasan berlapis mulai dari tingkat OPD hingga pemeriksaan eksternal oleh BPK. Auditor internal mengatakan bahwa sebagian besar OPD masih menempatkan pengawasan sebagai prosedur formalitas, bukan sebagai alat pengendalian yang sesungguhnya. Ketika mekanisme audit internal dianggap sebagai rutinitas, peluang terjadinya moral hazard semakin besar.

Di sisi lain, pejabat pengelola keuangan daerah menyampaikan bahwa kapasitas sumber daya manusia juga menjadi faktor kritis. Mereka mengungkapkan bahwa masih terdapat sejumlah staf pengelola anggaran yang belum sepenuhnya memahami prosedur pertanggungjawaban sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kondisi ini menyebabkan laporan yang disusun sering kali tidak akurat, terlambat, atau tidak didukung dokumen memadai. Ketidaksiapan ini sering mempersulit auditor internal untuk bekerja secara efektif, karena proses audit menjadi lebih lama dan rawan miskomunikasi.

Informan dari kalangan akademisi menambahkan bahwa budaya birokrasi di beberapa daerah di NTT masih bersifat patronase, di mana keputusan keuangan tidak selalu berdasarkan perencanaan teknokratis, tetapi sering dipengaruhi kepentingan tertentu. Pola seperti ini menciptakan ruang besar bagi penyalahgunaan kewenangan dan pengalokasian anggaran yang tidak sepenuhnya berbasis kebutuhan publik. Mereka juga menyoroti bahwa dalam berbagai temuan audit, ketidaksesuaian anggaran sering berulang tanpa adanya perbaikan sistemik.

Lebih jauh, penelitian ini menemukan bahwa hasil audit BPK sebenarnya telah memberikan rekomendasi yang cukup jelas mengenai kelemahan-kelemahan dalam sistem pengelolaan keuangan daerah. Namun berdasarkan hasil wawancara, implementasi rekomendasi masih rendah. Beberapa informan menuturkan bahwa tindak lanjut audit sering tidak dilakukan secara menyeluruh karena tidak adanya sanksi yang tegas ataupun mekanisme monitoring yang kuat dari inspektorat. Kelemahan dalam menindaklanjuti temuan audit inilah yang memungkinkan jenis pelanggaran yang sama muncul kembali pada audit tahun berikutnya.

Selain itu, para informan juga menggarisbawahi bahwa dinamika politik daerah berperan cukup kuat dalam proses penganggaran. Auditor internal menyampaikan bahwa dalam beberapa kasus, intervensi aktor politik mempengaruhi keputusan terkait proyek dan belanja yang tidak sepenuhnya didasarkan pada prioritas pembangunan. Dominasi aktor politik ini membuat proses pengawasan menjadi rumit karena auditor sering dihadapkan pada tekanan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga pelaksanaan audit tidak selalu dapat berjalan secara independen.

Temuan lapangan lainnya menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara regulasi tingkat nasional dan kondisi nyata di daerah. Walaupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan PP Nomor 12 Tahun 2019 telah mengatur prinsip-prinsip

pengelolaan keuangan daerah, implementasinya di lapangan belum seragam. Informan menyatakan bahwa perbedaan kapasitas antar-OPD menyebabkan tingkat kepatuhan terhadap regulasi sangat bervariasi. Hal ini semakin diperburuk dengan kurangnya pelatihan berkelanjutan sehingga pemahaman pegawai terhadap perubahan aturan tidak selalu diperbarui.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menunjukkan bahwa penyimpangan dalam pengelolaan anggaran daerah di NTT merupakan hasil dari interaksi berbagai faktor: lemahnya pengawasan internal, rendahnya kapasitas SDM, budaya birokrasi yang belum sepenuhnya transparan, tekanan politik, serta implementasi regulasi yang belum optimal. Pendekatan kualitatif melalui wawancara memungkinkan peneliti menggambarkan kondisi yang lebih komprehensif, memberikan gambaran mendalam mengenai akar masalah dan bagaimana praktik audit seharusnya ditingkatkan agar kasus serupa tidak berulang.

KESIMPULAN

Studi ini menemukan bahwa hasil audit audit proyek Rehabilitasi Irigasi Wae Ces di Kabupaten Manggarai menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) tidak dilaksanakan dengan baik, khususnya dalam hal kegiatan pengendalian, pemantauan, dan pengawasan internal. Ketidaksesuaian antara laporan realisasi dan kondisi fisik di lapangan disebabkan oleh kapasitas sumber daya manusia yang terbatas, pemisahan fungsi yang tidak optimal, dan kekurangan pengawasan teknis selama proyek. Hasil menunjukkan bahwa masalah dalam mengelola proyek infrastruktur daerah tidak semata-mata bersifat teknis; masalah ini berasal dari kelemahan sistemik dalam tata kelola dan pengendalian internal.

penelitian ini juga menemukan bahwa fungsi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) tidak efektif sebagai mekanisme pencegahan dini. Penyimpangan tidak terdeteksi sejak awal karena kurangnya auditor, beban kerja yang tinggi, dan pengawasan yang masih administratif. Kondisi ini menyebabkan auditor BPK menjadi lebih skeptis dan menerapkan pendekatan audit berbasis risiko yang lebih ketat. Pada akhirnya, hal ini meningkatkan kemungkinan temuan audit pada proyek infrastruktur daerah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, dari perspektif kebijakan, penelitian ini menekankan betapa pentingnya memperkuat SPIP lebih dari sekadar peraturan formal. Pemerintah daerah harus memprioritaskan peningkatan kemampuan staf pengelola proyek melalui pelatihan terus menerus, menegaskan bahwa fungsi pengelolaan keuangan dan proyek berbeda, dan meningkatkan fungsi APIP dengan dukungan sumber daya yang memadai dan independen.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2021). *Pedoman penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*. BPKP.

Creswell, J. W. (2021). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). Sage Publications.

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2019). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Sage Publications.

Ferreira, A., Morais, F., & Carvalho, J. (2022). Public infrastructure projects and fraud risk: Evidence from public sector auditing. *Public Money & Management*, 42(6), 417-426.

Hidayat, R., & Nugroho, A. (2020). Lingkungan pengendalian dan efektivitas sistem pengendalian internal pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 8(2), 85-99.

Laksmi, P. A., & Suryandari, D. (2023). Pengaruh sistem pengendalian internal terhadap temuan audit pada pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi Publik*, 15(2), 101-114.

Merriam, S. B., & Tisdell, E. J. (2019). *Qualitative research: A guide to design and implementation* (4th ed.). Jossey-Bass.

Nugraha, D., & Prabowo, H. (2023). Audit berbasis risiko dan kualitas temuan audit sektor publik. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 27(1), 64-78.

Putri, A. R., & Syamsuddin. (2021). Manajemen risiko dan efektivitas sistem pengendalian internal pemerintah daerah. *Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Publik*, 5(2), 112-126.

Rahman, F., & Fauzi, M. (2020). Pengawasan proyek infrastruktur dan risiko penyimpangan belanja modal daerah. *Jurnal Keuangan Negara*, 12(3), 201-214.

Ramadhani, R., & Kurniawan, R. (2023). Audit sektor publik dan pencegahan penyimpangan anggaran daerah. *Jurnal Tata Kelola Keuangan Negara*, 9(1), 45-59.

Saputra, B., & Adi, P. H. (2022). Karakteristik temuan audit dan kualitas pengelolaan keuangan daerah. *Jurnal Akuntansi Sektor Publik*, 4(2), 97-110.

Sari, D. P., & Rahayu, S. (2020). Sistem pengendalian internal dan implikasinya terhadap kualitas pengelolaan keuangan daerah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 11(3), 233-247.

Sutrisno, T., & Mahendra, Y. (2021). Kematangan SPIP dan implikasinya terhadap temuan audit pemerintah daerah. *Jurnal Akuntabilitas Publik*, 9(1), 41-56.

Wahyuni, S., & Lestari, D. (2024). Pengawasan internal dan pencegahan penyimpangan anggaran daerah. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(1), 23-37.

Widyaningsih, R., & Pratama, A. (2024). Implementasi SPIP dan temuan audit pada proyek infrastruktur daerah. *Jurnal Akuntansi Sektor Publik*, 6(1), 55-69.

Yin, R. K. (2021). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). Sage Publications.

Zulkarnain, R., & Hamzah, A. (2019). Sistem pengendalian internal dan tata kelola keuangan sektor publik. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen Publik*, 6(2), 133-146.